

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

a) Penelitian I (Milton C. Cummings)

Penelitian terdahulu yang diutarakan oleh Milton C. Cummings . Definisi Diplomasi Budaya oleh ilmuwan dan penulis politik Amerika, Milton C. Cummings (2009) “pertukaran ide, informasi, nilai, sistem, tradisi, kepercayaan, dan aspek budaya lainnya, dengan maksud untuk menumbuhkan saling pengertian”. Ini kadang-kadang dibicarakan sebagai melibatkan penggunaan kekuatan lunak sebagai lawan dari kekuatan keras¹.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, menjalankan diplomasi kebudayaan berarti dengan sengaja dan terarah menanamkan, mengembangkan, dan memelihara citra Indonesia di luar negeri sebagai bangsa dan negara yang berkebudayaan tinggi. Selain itu upaya yang dilakukan sebagai salah satu sasaran kebijakan dari Indonesia untuk melaksanakan diplomasi kebudayaan dalam implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia.

b) Penelitian II (Anholt)

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Anholt menyatakan bahwa aset penting untuk meningkatkan suatu identitas kompetitif suatu negara adalah citra negara dan reputasi internasionalnya. Kebudayaan saat ini telah mengalami perkembangan dalam hubungan internasional, yaitu kebudayaan telah dijadikan sebagai alat untuk menunjang kegiatan diplomasi. Diplomasi kebudayaan digunakan untuk tujuan mempengaruhi pendapat umum (masyarakat internasional) dalam upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara.

Saat ini Indonesia telah menggunakan instrument kebudayaan dalam melaksanakan penguatan diplomasi kebudayaan ke negara lain. Salah satunya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan mendirikan pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri yaitu Rumah Budaya Indonesia. Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan implementasi program Rumah Budaya Indonesia di Belanda untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana implementasi program rumah budaya Indonesia di Belanda sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia tahun 2015-2017”. Penelitian ini menggunakan Teori Diplomasi, Teori Kepentingan Nasional, Konsep Diplomasi Kebudayaan, serta Konsep Rumah Budaya Indonesia. Metode penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian skripsi ini memperlihatkan kegiatan-kegiatan apa saja yang

¹ https://www.researchgate.net/publication/362083026_Seni_Kota_dan_Diplomasi_Budaya

dilakukan Rumah Budaya Indonesia di Belanda sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia di luar negeri sepanjang tahun 2015-2017 serta pencapaian kepentingan nasional yang telah didapatkan Indonesia².

c) Penelitian III (Vira Aulia)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vira Aulia dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Strategi Diplomasi Budaya Indonesia Tahun (2016-2019) Menuju Pusat Fesyen Muslim Dunia”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi diplomasi budaya Indonesia tahun 2016-2019 menuju pusat fesyen Muslim dunia. Sebagai anggota Organisasi Kerjasama Negara Islam (OKI), Indonesia termasuk dalam pengeksport produk fesyen Muslim terbesar ke-3 di dunia, saat ini pemerintah terus mendorong Indonesia menjadi pusat fesyen Muslim dunia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif guna menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang hingga operasionalisasi strategi diplomasi budaya Indonesia menuju fesyen Muslim dunia.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan konsep diplomasi budaya dan diplomasi multi jalur. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dibawah kementerian perindustrian dan para desainer atau pelaku usaha IKM adalah

- 1) Mengikuti ajang peragaan busana Muslim.
- 2) Membuat ajang peragaan busana Muslim di Indonesia.
- 3) Memasarkan fesyen Muslim melalui e-commerce.

d) Penelitian IV (Rahma Indah Permatasari)

Penelitian terdahulu Rahma Indah Permatasari dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta” tahun 2018 yang berjudul “Diplomasi Kebudayaan Indonesia di Belanda: Implementasi Program Rumah Budaya Indonesia di Belanda Tahun 2015-2017”

Skripsi ini membahas tentang “Diplomasi Kebudayaan Indonesia Di Belanda : Implementasi Program Rumah Budaya Indonesia Di Belanda Tahun 2015-2017”. Kebudayaan saat ini telah mengalami perkembangan dalam hubungan internasional, yaitu kebudayaan telah dijadikan sebagai alat untuk menunjang kegiatan diplomasi. Diplomasi kebudayaan digunakan

² Ibid

untuk tujuan mempengaruhi pendapat umum (masyarakat internasional) dalam upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara.

Saat ini Indonesia telah menggunakan instrument kebudayaan dalam melaksanakan penguatan diplomasi kebudayaan ke negara lain. Salah satunya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan mendirikan pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri yaitu Rumah Budaya Indonesia. Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan implementasi program Rumah Budaya Indonesia di Belanda untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana implementasi program rumah budaya Indonesia di Belanda sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia tahun 2015-2017”. Penelitian ini menggunakan Teori Diplomasi, Teori Kepentingan Nasional, Konsep Diplomasi Kebudayaan, serta Konsep Rumah Budaya Indonesia. Metode penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian skripsi ini memperlihatkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan Rumah Budaya Indonesia di Belanda sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia di luar negeri sepanjang tahun 2015-2017 serta pencapaian kepentingan nasional yang telah didapatkan Indonesia.

e) Penelitian V (Bagus Priambodo)

Penelitian terdahulu Bagus Priambodo dari Departement Hubungan Internasional Universitas Airlangga dengan judul “Program Pertukaran Pemuda AIESEC Indonesia untuk Mempromosikan Budaya Lokal Kemasyarakat Asing”

Penelitian ini mengkaji strategi AIESEC Indonesia untuk mempromosikan Budaya Lokal ke masyarakat Internasional. Berdasar pengamatan yang ada, media-media online resmi AIESEC Indonesia hanya menampilkan data-data statis dan belum memanfaatkan teknologi internet untuk mempromosikan budaya lokal seperti keris, batik, wayang kulit, tarian daerah, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, pada salah satu menunya menegaskan secara lugas bahwa aksi promosi budaya local Indonesia ke masyarakat Internasional menjadi program pertukaran pemuda yang dikenal dengan Global Citizen Programme (GCP).

2.2 Kerangka Teoritis

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya

diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Diplomasi merupakan praktek pelaksana perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara.³ Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung.

2.3 Diplomasi Budaya

Diplomasi kebudayaan memang bukanlah merupakan kosa kata baru. Kita sering mendengarnya, setidaknya kalau kita mengartikan diplomasi sekedar sebagai alat untuk mengola hubungan antarbangsa dan menganggap kebudayaan hanya sebatas kesenian saja. Joseph Nye (2004) Kebudayaan suatu bangsa mengandung nilai-nilai yang universal dan kebijakan mempromosikan nilai-nilainya yang memiliki daya tarik bagi pihak lain dapat

³ S.L., Roy, *Diplomasi*, Jakarta Utara, PT Raja Grafindo persada. hlm. 35. (1995).

meningkatkan popularitas suatu negara karena daya tarik yang dibentuk melalui budaya tersebut. Konsep-konsep tentang diplomasi memang dapat ditemui di berbagai buku tentang Hubungan Internasional. Begitu juga kajian tentang kebudayaan, dengan mudah dapat kita baca di berbagai literatur. Sedangkan buku maupun tulisan tentang diplomasi kebudayaan masih sangat langka. Baik yang berbahasa Inggris, apalagi yang berbahasa Indonesia. Itulah sebabnya penulis berupaya menyusun buku ini dengan harapan konsep-konsep diplomasi yang berkaitan dengan aspek kebudayaan dapat dikaji secara mendalam.

Ada yang bersifat mikro seperti yang selama ini dikenali oleh awam, yakni : bahwa kalau kita mendengar istilah kebudayaan berarti ada delegasi kesenian suatu negara yang dikirimkan ke negara lain, ada pula dalam pengertian makro yang mencakup pengertian kebudayaan secara lebih luas, sampai dengan nilai-nilai ideologi, nasionalisme, ataupun globalisasi.

Diplomasi tidak hanya diartikan sebagai perundingan (negosiasi) saja, melainkan juga acara mengelola hubungan antarbangsa, baik dalam keadaan damai maupun dalam situasi perang. Oleh karena itu, istilah diplomasi kebudayaan dalam buku ini bisa dibentangkan dari yang bersifat mikro, yang menganggap kebudayaan hanya sebagai kesenian saja, sampai dengan makro, yang menganggap pengelolaan hubungan antarbangsa dipastikan melibatkan aspek kebudayaan dalam arti yang luas.⁴

Budaya, terutama yang menarik bagi masyarakat lain, adalah salah satu sumber penting dari soft power. Diplomasi budaya menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh diplomasi politik, ekonomi, dan terutama diplomasi militer; kemampuan untuk meyakinkan pihak lain melalui budaya, nilai-nilai, serta ide dan tidak melalui kekerasan dengan menggunakan kapabilitas militer,

politik, maupun ekonomi. Walaupun diplomasi budaya tidak dapat diukur secara kuantitatif, diplomasi budaya dapat beroperasi di dunia, di mana power tersebar ke seluruh negara-negara di dunia dan saling ketergantungan sebagai etos kerjanya. Terdapat beberapa kekuatan utama dari diplomasi budaya:

a. Diplomasi budaya adalah koneksi 2 arah, bukan paksaan unilateral. Dengan demikian, diplomasi budaya memberikan ruang bagi dialog yang mengarah pada pembentukan rasa saling percaya

b. Diplomasi budaya dapat meningkatkan pemahaman di antara masyarakat dan budaya karena diplomasi budaya menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya

⁴ warsito,kartikasari,Diplomasi Kebudayaan,Ombak, (2016).

c. Diplomasi budaya beroperasi dalam rentang waktu yang panjang sehingga dapat menghubungkan pihak-pihak dari kelompok yang berkonflik, bahkan pada keadaan hubungan diplomatik yang negatif. Oleh karena itu, diplomasi budaya dapat bertindak sebagai satu-satunya solusi yang efektif ketika muncul ketegangan dan konflik.

2.4 Diplomasi Publik

Multy-track diplomacy atau diplomasi publik menggambarkan adanya perubahan perilaku dari tingkah diplomasi yang sebelumnya dilakukan oleh petinggi negara kini telah menjadi bagian aktifitas publik pada umumnya. Perubahan ini didasarkan bahwa pemerintah saat ini tidak bisa lagi menjawab tantangan-tantangan dari isu global yang semakin kompleks, sedangkan pemerintah terkesan masih bersifat kaku. Hal ini pemerintah juga berharap diplomasi publik bisa memberikan kontribusi yang tepat dan efektif untuk memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap masyarakat internasional.⁵ Diplomasi publik secara umum merupakan upaya untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *Informing understanding, and influencing foreign audiences*. Dengan jalan memberikan kontribusi interaksi yang sebelumnya *government to government relation* kini menjadi *government to people* atau bahkan *people to people relation*. Dimana tujuannya adalah agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas.

Diplomasi publik bertujuan untuk menumbuhkan opini masyarakat yang positif dari negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Oleh karena itu diplomasi publik menegaskan akan kemampuan komunikasi antar budaya karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan politik luar negeri. Karena era global seperti saat ini pendapat dari masyarakat secara efektif mempengaruhi tindakan terhadap pemerintah. Karakter diplomasi publik yang informal seringkali berhasil menurunkan kelegangan, menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan saling pengertian di antara pihak-pihak yang saling bertikai. Oleh karena beragamnya diplomasi publik (track kedua), kegiatan ini telah dipecah lagi menjadi beberapa jalur, atau yang lebih dikenal sebagai "*multy track diplomacy*". Idealnya, setiap jalur diplomasi sepenuhnya memanfaatkan keahlian, pengalaman, dan sumberdaya yang ada dan bekerja sama untuk mempengaruhi negosiasi pemerintah secara signifikan.

⁵ //http.wordpress.com.isu hubungan internasional. diplomasi publik. (diakses pada 6 november 2020, pukul 15.00 WIB)

Diplomasi publik merupakan sebuah kebutuhan dalam mengembangkan politik diplomasi yang lebih menyentuh aspek sosial budaya guna melahirkan sikap saling percaya dan saling mengerti sebagai landasan untuk bekerja sama sama lain, Maka, dalam melancarkan diplomasi publik atau diplomasi total, Divisi Diplomasi Publik selalu memberikan gambaran kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, golongan, dan agama, bisa hidup rukun berdampingan dalam membangun kebersamaan. Bangsa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan kerja sama diberbagai bidang, terutama bidang kebudayaan.

2.5 Teori Kepentingan Nasional

Disini yang akan dibahas adalah kepentingan nasional Indonesia, Politik luar negeri Republik Indonesia baik sebagai *policies* maupun *action* senantiasa mengandung unsur kesinambungan dan perubahan yang saling berinteraksi. Hal ini meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat serta prinsip-prinsip yang disepakati, sementara perubahan menyangkut strategi, prioritas dan cara-cara bagaimana memperjuangkan kepentingan nasional. Proses transformasi yang terjadi dari inputs menjadi output sekaligus merupakan cerminan bagaimana sebuah negara mengelolah politik luar negeri yang dipengaruhi oleh tiga faktor: lingkungan internal/eksternal, struktur dan perilaku sosial.⁶

Nilai-nilai dan prinsip politik luar negeri dapat digolongkan ke dalam tataran ideal. Meskipun terkadang terdapat kesenjangan, inkonsistensi atau bahkan kontradiksi dalam mentransformasikan tataran ideal ke dalam tataran operasional pasti selalu bermuara pada satu tujuan mewujudkan kepentingan nasional. Menurut Norman J. Padelford, kepentingan nasional adalah: “*National interest of a country is what a governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security and economic welfare*”. (Kepentingan nasional suatu negara adalah apa yang oleh para pemimpin pemerintahan dan sebagian besar juga apa yang dianggap rakyatnya setiap saat penting bagi kemerdekaan nasional, cara hidup, keamanan teritorial dan kesejahteraan ekonomi mereka).⁷

Kepentingan nasional sama dengan kepentingan masyarakat, tetapi pemerintah yang kemudian diberikan kewenangan sebagai perwakilan jutaan rakyat untuk bertanggungjawab merumuskan hingga memperjuangkan kepentingan tersebut baik melalui kebijakan dalam

⁶ Richard Snyder et.al. (eds), *Foreign Policy Making; the free Press of Glencoe, USA, (1962)*

⁷ Norman J. Padelford and George A. Lincoln, *International Politics, The Macmillan Company, (1987)*

negeri maupun luar negeri. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Paul Seabury dalam tulisannya bahwa : “Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita suatu bangsa berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain, dengan kata lain gejala tersebut merupakan suatu normatif atau konsep umum kepentingan nasional”.

Arti kedua yang sama pentingnya biasa dianggap deskriptif, dalam pengertian kepentingan nasional hanya dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai negara secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif berarti memindahkan metafisika ke dalam fakta (kenyataannya). Dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri.⁸

Kepentingan nasional sebelum mencapai level pengaplikasian harus melalui segenap tahapan dimulai dari awal perumusan, proses persiapan, pelibatan setiap elemen pemerintah, pemanfaatan instrument yang dimiliki negara hingga faktor pendukung lainnya hingga mencapai tatanan ideal dari kepentingan nasional sebagai salah satu tujuan negara.

Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Daniel S. Papp yang melihat kepentingan nasional dari sudut subjektifitas tergantung pada periode yang sedang berjalan sehingga menyebabkan kebijakan luar negeri yang diambil di setiap era pemerintahan tidak mutlak sama.⁹

Kepentingan nasional yang berasal dari berbagai dimensi saling berkaitan satu sama lain dan kemudian terimplikasi secara sistemik dalam bentuk pengaplikasian. Pencapaiannya bahwa hal ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya potensi domestik suatu negara yang juga bisa diistilahkan sebagai kekuatan nasional. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur skala kekuatan nasional dapat digambarkan dari mengukur besar kecilnya kepemilikan sumber daya alam dan faktor geografis suatu negara selain itu penyimbangan kekuatan bisa juga dilihat dari kemampuan industri, kesiagaan militer, populasi, kualitas diplomasi, kualitas pemerintahan, karakter dan moral nasional. Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar kekuatan, dimana kekuatan adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengadilan ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama.

⁸ KJ. Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, Bina Cipta, Bandung, 1987

⁹ Daniel S Papp, *Contemporary, International Relation - Framework for Understanding-*, Mcmillan Publishing Company, New York (1998)

Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan aktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional bagi Indonesia secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks kekinian (pasca Orde Baru), kepentingan nasional lebih merujuk pada aspek ekonomi dan politik. Di era Habibie, misalnya kepentingan nasional dalam dunia diplomasi mengacu ke upaya pemulihan ekonomi. Sementara diplomasi di era Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional, selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan diarahkan pula pada upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik dan mempertahankan integritas teritorial Indonesia. Hal lain yang tidak kalah penting adalah demokratisasi melalui reposisi peran militer agar kembali ke peran profesional.

Ancaman terhadap integrasi nasional di era Wahid, menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan diprioritaskan. Hal yang sama dalam derajat tertentu dilanjutkan pemerintahan Megawati, ditambah 36 kepentingan pokok lain terkait dengan upaya mengatasi terorisme. Kepentingan nasional era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sebenarnya sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, selain keinginan untuk menempatkan Indonesia dalam posisi yang kembali aktif dalam pencatutan politik global.¹⁰

Diplomasi dalam konstelasi politik luar negeri hakekatnya adalah muslihat yang bijaksana dengan perundingan untuk mencapai cita-cita bangsa. Efektivitas diplomasi dan atau politik luar negeri tidak terlepas dari pergolakan di dalam negeri, sebab pada intinya kebijakan luar negeri tidak lain merupakan refleksi dari kebijakan dalam negeri. Sehebat apapun para diplomat yang dimiliki sebuah negara, tetapi bila di dalam negeri penuh dengan kegaduhan politik atau bahkan terjadi pelanggaran hak asasi secara masif, maka ketajaman diplomasi sang diplomat menjadi tumpul. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam diplomasi, perlu ada gerakan kuat di dalam negeri sebagai sebuah sendi dari gerakan diplomasi itu. Jadi, tenaga perjuangan rakyat yang kuat perlu sekali untuk menyokong usaha diplomasi yang dijalankan pemerintah. Diplomasi yang tidak disokong oleh tenaga perjuangan yang kuat niscaya tidak akan berhasil. Pengembangan citra Indonesia yang positif di luar negeri dengan demikian menjadi prasyarat bagi tercapainya tujuan kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas. Hal demikian ini didasari oleh suatu asumsi bahwa terbentuknya citra Indonesia yang positif di luar

¹⁰ Ganewati Wuryandari, *Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia*, LIPI, Jakarta (2009)

negeri akan mempermudah tercapainya tujuan nasional Indonesia, yaitu meningkatnya persahabatan dan kerjasama internasional dan regional melalui forum multilateral dan bilateral, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan pembangunan nasional di segala bidang.

Menurut K.J Hoslty kepentingan nasional mencakup empat unsur,¹¹yakni;

1. Security (Keamanan)

Merupakan tujuan utama dari setiap negara untuk mempertahankan diri (Self Defence), dalam artian untuk melindungi penduduk, wilayah, kedaulatannya dari ancaman yang membahayakan dan bukan hanya dalam perang dan juga hal yang bersifat fisik saja, namun juga termasuk dalam hal penduduk, pemerintah, ekonomi serta ideologi.

2. Autonomy (Otonomi)

Kemampuan untuk memformulasikan kebijakan domestik dan luar negeri berdasarkan pada prioritas pemerintah sendiri dan segala resikonya, serta kemampuan untuk menahan tekanan, pengaruh dan ancaman dari negara lain. Unsur ini masuk pada mekanisme dari diplomasi budaya dalam negeri yaitu, kerjasama dengan salah satu pemerintah daerah dengan penyelenggaraan diplomasi budaya antara Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya yang mengurus bidang kebudayaan dan komunitas atau penggiat yang menjadi pemangku kepentingan di bidang kebudayaan guna melestarikan kebudayaan domestik agar bisa di perkenalkan ke kancah internasional dengan kondisi yang serupa, salah satunya sebagai contoh alat gamelan yang harus di lestarikan dan di jaga kondisinya. Dan juga masuk pada mekanisme dari diplomasi budaya luar negeri yaitu, kerjasama bilateral dengan diplomasi budaya Indonesia dengan negara mitra guna sebagai senjata untuk menghindari konflik.

3. Wellfare (Kesejahteraan)

Faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu negara. Sebagai contoh adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan militer terbesar namun tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya merupakan kelompok golongan negara kurang baik. Sedangkan negara yang memiliki kekuatan militer kurang kuat namun memperhatikan kesejahteraan rakyatnya adalah negara yang baik.

¹¹ K.J Holsty, *International Politics:A Frame Work for Analysis*.New York Premitise Hall International Inc. (1995)

4. Prestigious (Prestis)

Keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan yang penting, selain pandangan tradisional yang menganggap sumber utama status adalah kekuatan militer. Sebagai contoh adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara semi peri-peri untuk menjadi negara pusat, Negara berkembang atau pinggiran untuk menjadi negara maju.¹²

¹² Ibid